

Tindaklanjuti Investasi UEA, Tim Provinsi Aceh dan Aceh Singkil Gelar Pertemuan



Tim Provinsi Aceh melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, membahas tindak lanjut proposal investasi UEA, Rabu (4/11/2020).

SERAMBINNEWS.COM, SINGKIL - Tim Provinsi Aceh melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid membahas proposal investasi Uni Emirat Arab (UEA), Rabu (4/11/2020).

Tim Provinsi terdiri atas Staf Khusus Gubernur Aceh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Kepala BKSDA dan pejabat lain. Sementara dari Pemkab Aceh Singkil, selain Bupati hadir Wakil Bupati Sazali, serta pejabat lain.

Bupati Aceh Singkil dalam kesempatan tersebut mengaku, sangat antusias menyambut kedatangan tim Provinsi Aceh.

"Kami merasa istimewa dan senang, dengan usaha dan upaya bisa masuk dalam rencana investasi UEA. Terimakasih atas kehadirannya," kata Dulmusrid.

Dulmusrid menyatakan, pihaknya sangat berharap investor UEA jadi berinvestasi di Kepulauan Banyak. Sehingga, daerahnya menjadi destinasi tujuan wisatawan dunia.

"Apa yang disusun dalam proposal bisa disetujui. Kami ingin wisata Aceh Singkil menjadi destinasi dunia," ujar Dulmusrid.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin mengatakan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah sangat serius dalam menindaklanjuti rencana investasi UEA.

"Pak Gubernur utus kami, segera ke Singkil. Pemerintah Aceh selalu berupaya maksimal untuk memajukan Aceh Singkil," ujar Jamaluddin.

Sementara itu, staf khusus Gubernur Aceh, Iskandar menyatakan, tujuan kehadirannya untuk sempurnakan proposal yang sebelum melakukan pertemuan dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

"Proposal sebelumnya sudah diserahkan ke Dubes UEA. Proposal itu sudah sempurna, namun ada yang harus dilengkapi agar lebih sempurna lagi," kata Iskandar. **(Diskominfo)**

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2020/11/04/tindaklanjuti-investasi-uea-tim-provinsi-aceh-dan-aceh-singkil-gelar-pertemuan>, Rabu, 4 November 2020.

Catatan :

- A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. Pasal 363 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan
 2. Pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain
 - b. Pihak ketiga dan/ atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pasal 367 ayat (1) menyatakan bahwa Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Pertukaran budaya
 - c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan
 - d. Promosi potensi Daerah dan
 - e. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

1. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai hubungan diplomatik
 - b. Merupakan urusan pemerintah daerah
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri
 - d. Pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri dan
 - e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah